

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

TESIS

OLEH

**ADE IRMA HASANAH
NPM: 221801001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ADE IRMA HASANAH
NPM: 221801001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan
Helvetia**

Nama : Ade Irma Hasanah

NPM : 221801001

MENYETUJUI

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 18 Maret 2025

Nama : Ade Irma Hasanah

NPM : 221801001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Sekretaris : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , Maret 2025



Ade Irma Hasanah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Irma Hasanah
NPM : 221801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



Ade Irma Hasanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.

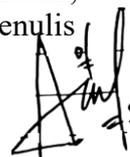
Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas A Program Studi Magister Administrasi Publik 2022 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan,
Penulis

Maret 2025



Ade Irma Hasanah

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Nama : Ade Irma Hasanah
NPM : 221801001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Medan Helvetia memiliki beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya yakni masih terbatas anggaran, kualitas SDM yang belum memadai, dan motivasi masyarakat berpartisipasi mengikuti Musrenbang masih rendah. Indikator efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penelitian ini menggunakan teori R. Nugroho dan Wrihatnolo yang meliputi partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Medan Helvetia belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak tersalurkan secara keseluruhan, tahapan proses pengajuan perencanaan pembangunan yang cukup panjang sehingga terjadi reduksi dari pengajuan usulan dan negosiasi masyarakat terhadap pemerintah juga semakin kecil serta kurangnya anggaran, dan kualitas SDM yang belum memadai. Masalah dalam anggaran dan SDM memberikan suatu peringatan bahwa pentingnya anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Medan Helvetia untuk menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Musrenbang, Kecamatan.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PLANNING DELIBERATION (MUSRENBANG) IN MEDAN HELVETIA DISTRICT

Name : Ade Irma Hasanah
NPM : 221801001
Study Program : Master of Public Administration
Adviser I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Adviser II : Dr. Adam, MAP

The Sub-district Development Planning Deliberation (Musrenbang) is a forum for deliberation between stakeholders to discuss and agree on steps for handling priority program activities listed in the List of Proposed Sub-district Development Activity Plans that are integrated with the development priorities of the district/city. The Musrenbang of the District/City Regional Government Work Plan (RKPD) in the sub-district is coordinated by the District/City Regional Development Planning Agency and implemented by the Sub-district Head. The implementation of Musrenbang in Medan Helvetia Sub-district has several problems and challenges, including limited budget, inadequate quality of human resources, and low community motivation to participate in Musrenbang. The indicators of the effectiveness of the implementation of Musrenbang in this study use the theory of R. Nugroho and Wrihatnolo which include participation, transparency, accountability, and systematic. The research method used in this study is descriptive data analysis with a qualitative approach. The data collection techniques used are interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Musrenbang in Medan Helvetia Sub-district has not been effective. This can be seen from the community participation in decision making is not channeled as a whole, the stages of the development planning submission process are quite long so that there is a reduction in the submission of proposals and negotiations between the community and the government are also getting smaller and the lack of budget, and the quality of human resources is not yet adequate. Problems in the budget and human resources provide a warning that the importance of a sufficient budget and competent human resources in the preparation of regional development planning in Medan Helvetia District to be more qualified, effective, and efficient in achieving regional development goals so that it can improve community welfare.

Keywords: *Effectiveness, Musrenbang, District*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Efektivitas	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	8
2.1.2 Efektivitas Perencanaan Partisipatif.....	9
2.1.3 Efektivitas Perencanaan Transparansi.....	9
2.1.4 Efektivitas Perencanaan Akuntabilitas.....	10
2.1.5 Efektivitas Perencanaan Sistematis.....	12
2.2 Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	13
2.2.1 Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	13
2.2.2 Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	15
2.2.3 Prinsip Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	16
2.3 Konsep Perencanaan Pembangunan.....	17
2.3.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	17
2.3.2 Tujuan Dan Fungsi Perencanaan Pembangunan.....	18
2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan.....	19
2.3.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	20
UNIVERSITAS MEDAN AREA Konsep Pelaksanaan	22

2.4.1 Pengertian Pelaksanaan.....	22
2.4.2 Model Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	23
2.4.3 Aspek Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	25
2.4.4 Komponen Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	26
2.4.5 Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	26
2.5 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	27
2.5.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	27
2.5.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan.....	29
2.5.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	30
2.5.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	33
2.5.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	34
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Fokus Penelitian.....	42
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Teknik Analisa Data.....	47
3.6 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional.....	49
3.6.1 Definisi Konseptual.....	49
3.6.2 Definisi Operasional.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Profil Pemerintah Kota Medan Dan Kecamatan Medan Helvetia.....	52
4.1.1 Profil Kota Medan.....	52
4.1.1.1 Sejarah Berdiri Kota Medan.....	52
4.1.1.2 Keadaan Geografis dan Luas Wilayah.....	54
4.1.1.3 Visi Dan Misi Kota Medan.....	59
4.1.1.4 Lambang Dan Motto Kota Medan.....	61
4.1.1.5 Wilayah Administrasi Kota Medan.....	62
4.1.2 Profil Kecamatan Medan Helvetia.....	63

4.1.2.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Helvetia.....	63
4.1.2.2 Keadaan Geografis Dan Luas Wilayah.....	66
4.1.2.3 Visi dan Misi Kecamatan Medan Helvetia.....	68
4.2.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia.....	71
4.2.1.5 Tugas dan Fungsi Bagian/Unit Kerja di Kecamatan Medan Helvetia.....	72
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Medan Helvetia.....	85
4.2.2 Faktor Yang Menjadi Kendala Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.6 Kesimpulan Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 2.7 Kerangka Berpikir.....	42
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Medan menurut Kecamatan (%).....	61
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan pada KecamatanKecamatan di Kota Medan.....	65
Tabel 4.1.2 Nama Camat yang Memimpin Kecamatan Medan Helvetia Dari Tahun 1991- Sekarang.....	67
Tabel 4.1.3 Nama Kelurahan, Lurah dan Jumlah Lingkungan Di Kecamatan Medan Helvetia.....	68
Tabel 4.1.4 Luas Wilayah dan Persentase Kelurahan Terhadap Luas Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2023.....	69
Tabel 4.1.5 Daftar Alamat Kantor Kelurahan Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia.....	70
Tabel 4.1.6 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia.....	73
Tabel 4.1.7 Jumlah ASN, Honorer, dan P3SU Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2023.....	87
Tabel 4.2.1 Hasil Musrenbang Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2023 Untuk Tahun 2024.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.5 Komponen-komponen Analisa Data.....	53
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Medan.....	60
Gambar 4.2 Lambang Kota Medan.....	63



LAMPIRAN

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.....	114
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Medan Helvetia Menurut Perangkat Daerah 2025.....	115
Dokumentasi pelaksanaan penelitian, riset, wawancara, dan pengambilan data di kecamatan Medan Helvetia.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perencanaan pembangunan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi suatu masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh. Keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pemerintah ditentukan oleh bagaimana kualitas dari perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat *Top Down Planning* menjadi *Bottom Up Planning* yang menekankan pada penjaringan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah,

dan menyeluruh. Sedangkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2024 pelaksanaan diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerahnya dan proses mewujudkan pembangunan daerah tersebut dengan sebuah perencanaan. terhadap masing-masing daerah diberikan seluruh atau sebagian urusan pemerintah dibidang tertentu untuk menjalankan urusan rumah tangganya, atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan daerahnya sendiri sesuai dengan tujuan pembangunan. Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tewujudnya perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai peranan sangat strategis dalam menjembatani antara kepentingan perencanaan strategi jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan adanya koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum

daerah yang disebut Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang). Musrenbang merupakan media dialog yang digunakan untuk menampung aspirasi Masyarakat serta permasalahan Masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, tantangan eksternal dan potensi yang ada pada daerah serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di Kabupaten. Musrenbang

RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter, menurut Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007, tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan (musrenbang) yakni :

- a. Merupakan “*demand driven process*” artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.
- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).
- d. Bersifat “*strategic thinking process*” artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
- e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta.
- f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan

permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.

- g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan musrenbang adalah untuk membahas pembangunan yang sudah terlaksana dan dilaksanakan dalam rangka antara lain:

- a. Menyetakati permasalahan pembangunan daerah
- b. Menyetakati prioritas pembangunan daerah
- c. Menyetakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta Lokasi
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, penyelarasan tersebut berupa program dan kegiatan daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam musrenbang kecamatan.
- e. Klasifikasi kegiatan dan program yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan dan program desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Dari fakta yang terdapat dilapangan, bahwa efektivitas musrenbang di Kecamatan Medan Helvetia masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak tersalurkan secara

keseluruhan dan baik disebabkan tahapan proses pengajuan perencanaan pembangunan yang cukup panjang sehingga terjadi reduksi dari pengajuan usulan dan negosiasi masyarakat terhadap pemerintah juga semakin kecil. Terjadi pengkerucutan usulan-usulan yang disampaikan sehingga masih ada beberapa usulan kegiatan pembangunan yang tertampung dalam musrenbang tidak terealisasi, terkait dengan informasi dan alokasi kegiatannya dan realisasinya hanya menyebar disekitaran lembaga yang terkait dan turut dalam program kegiatan tersebut, dan kurangnya tenaga fungsional perencana di Kecamatan Medan Helvetia.

Secara umum permasalahan dalam musrenbang masih terbatas anggaran, kualitas SDM yang belum memadai, dan motivasi masyarakat berpartisipasi mengikuti musrenbang masih rendah. Berbekal fenomena diatas memicu penulis untuk mencoba mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi. Dengan acuan fenomena tersebut penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:menganalisa efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi pembaharuan dan rekomendasi bagi Kecamatan Medan Helvetia dalam melihat kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis aspirasi rakyat.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Helvetia dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pengertian efektivitas tergantung dari konteks bagaimana tersebut digunakan. Secara umum, menurut para ahli bahwa efektivitas dapat diartikan seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sumber daya yang tersedia dengan maksimal.

Menurut Revianto dan Masruri (2014) efektivitas seberapa baik pekerjaan yang dilaksanakan. Sejauh mana orang yang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Begitupun Abdulrahmat (2003:92) efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Emerson yang dikutip oleh Soewanto Handyaningrat (1996) yang mana efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan

Musrenbang didasarkan pada teori R. Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, sistematis

Menurut Sutarman (Kunarjo, 2002) efektivitas organisasi dalam suatu program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor-faktor pendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa peranan pendamping, partisipasi masyarakat, dan kemampuan kelompok sasaran.

2.1.2 Efektivitas Perencanaan Partisipatif

Menurut Nugroho dan Wrihatnolo (2011) bahwa ketelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan diperkirakan akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan tepat misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik.

2.1.3 Efektivitas Perencanaan Transparansi

Transparansi artinya terbuka akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen system informasi public dalam teori yang dikemukakan oleh Nugroho dan Wrihatnolo (2011).

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Indikator transparansi yaitu:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat koordinasi terhadap pagu Perangkat Daerah yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.4 Efektivitas Perencanaan Akuntabilitas

Menurut teori yang dikemukakan Nugroho dan Wrihatnolo (2011) bahwa setiap perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan

oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan tersebut yang artinya akuntabilitas.

Menurut Bastian (2010:385) akuntabilitas public sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yakni :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas manajerial.

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.5 Efektivitas Perencanaan Sistematis

Menurut Nugroho dan Wrihatnolo (2011) sistematis adalah

serangkaian upaya untuk mencari, memilih dan mengelola bukti terbaik yang tersedia untuk disusun secara runtun dan berurut. Begitupun dengan Hayati (2017) sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk system yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, pengetahuan yang tersusun secara berangkai dan berurut.

2.2 Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

2.2.1 Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. (Siagian:1994)

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan

musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/ kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi.

Proses musrenbang pada dasarnya mendafta aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.

Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Pada tingkat kecamatan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu dan permasalahan skala kecamatan, prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan, menyepakati program dan kegiatan lintas desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sebagai masukan bagi Forum SKPD dan bahan pertimbangan kecamatan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari proses

penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

2.2.2 Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi :

- a. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal, Rencana Kerja SKPD menjadi rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai

kesepakatan Musrenbang.

- b. Melakukan kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD

2.2.3 Prinsip Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. Prinsip kesetaraan: Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.
- b. Prinsip musyawarah dialogis: Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan

berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak diatas kepentingan individu atau golongan.

- c. Prinsip keberpihakan: Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

2.3 Konsep Perencanaan Pembangunan

2.3.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi. Arthur W. Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Jensen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber

daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya (Riyadi 2002:8).

Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai perencanaan pembangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pengarahannya penggunaan sumber daya pembangunan yang terbatas agar dapat mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Islamiyah, Fakhriannor, & Herman, 2021).

Secara prinsip, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang dibuat dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang selalu menjadi proses yang tidak berakhir.

2.3.2 Tujuan Dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan dan fungsi pokok, tujuan dan fungsi pokok tersebut sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu:

a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik Nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Daerah.

Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga

sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD).

Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

2.3.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dari proses Perencanaan Pembangunan yang meliputi:

a. Penyusunan rencana;

Langkah pertama dalam penyusunan rencana adalah membuat rancangan rencana pembangunan yang lengkap. Setiap instansi pemerintah kemudian mempersiapkan rancangan rencana kerja sesuai dengan rancangan rencana pembangunan yang sudah disiapkan dengan melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh setiap tingkat pemerintahan melalui kegiatan musyawarah serta menyusun rancangan akhir rencana pembangunan.

b. Penetapan rencana;

Setelah rencana disusun, tahap selanjutnya adalah penetapan rencana yang akan menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melakukannya. Menurut Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang Nasional maupun Daerah ditetapkan menjadi Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah, serta rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana;

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian ini melibatkan

kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD.

d. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tertulis dalam dokumen rencana pembangunan.

2.4 Konsep Pelaksanaan

2.4.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan secara rinci. Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan adalah suatu aktifitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana atau kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan juga ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan

dalam suatu program dan proyek.

- b. Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya
- c. Siagian S.P, pengertian pelaksanaan yakni merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Adisasmita, 2011: 22).

2.4.2 Model Pelaksanaan Kebijakan Publik

Adapun dalam pelaksanaan atau mengimplementasikan suatu kebijakan dikenal beberapa model sebagai berikut :

- a. Teori Donald S.Van dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia.

3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. (Subarsono, 2019:93)

b. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle ada dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Variabel isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauh manakepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, letak suatu

program sudah tepat, suatu kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, suatu program di dukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Variabel lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa esar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan seponsivitas kelompok sasaran. (Subarsono, 2019:99)

Dari dua macam model implementasi kebijakan yang ada, penulis menggunakan model implementasi dari Grindle karena dalam teori Grindel variabel yang ada sesuai dengan penelitian penulis.

2.4.3 Aspek Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

- a. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana
- c. Ketersediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut
- d. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif.
- e. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan

- f. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.4.4 Komponen Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

- a. Sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun Kemampuan organisasional;
- b. Tujuan kebijakan, dimana biasanya tujuan kebijakan masih bersifat abstrak dan harus diwujudkan dalam realitas;
- c. Hasil yang berupa keluaran yang berupa keadaan yang diinginkan (*output*) atau keluaran yang berupa realitas yang bisa dihitung (*outcome*); manfaat (*benefit*); dampak (*impact*).

Selanjutnya, implementasi kebijakan juga melibatkan beberapa aktifitas yakni :

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan kembali sumber daya, unit dan metode sesuai dengan tujuan kebijakan
2. Penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam istilah dan acuan yang bersifat lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personil lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau kelompok sasaran
3. Aplikasi yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau pelaksanaan
4. Instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama.

2.4.5 Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik

- a. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan

- yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
- b. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.
 - c. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan

2.5 Konsep Evaluasi Kebijakan

2.5.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi

dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh

pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

2.5.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Menurut pendapat Marielle Berriet - Sollicec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk “*Seminar 122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) “ di Ancona, 17-18 Februari 2011 yang berjudul Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence, mengatakan bahwa : When an evaluation procedure is used to assess a public action programme, generally the goal is to produce the best iknowledge possible on the actual impact of the programme. The best knowledge should be a) based on relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous methods).*

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik , umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam) dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat.

2.5.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463)

memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

- a. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan;
- c. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan;
- d. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) yakni :

- a. memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan;
- b. untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan
- c. untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam, yakni :

- a. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi

sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

2.5.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe, yakni :

- a. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
- b. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
- c. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

- tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
- d. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat;
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan; dan
- f. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2.5.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan

melakukan evaluasi. Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan, yakni :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program.

Sedangkan Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yakni :

- a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial;

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program; dan

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi

merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah kajian dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan disesuaikan dengan variabel penelitian. Kajian ini diperlukan untuk melihat kemungkinan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini juga berguna untuk melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Tema yang diambil penelitian ini bukanlah tema baru. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Berikut penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini:

Penelitian pertama berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung” di tulis oleh Ade Septia Nugraha mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun dalam indikator sistematis dan erpadu sudah efektif tetapi dalam indicator transparan dan akuntabel tidak efektif.

Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Sitem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”, di tulis Reny Dwi Karuniawati, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya. Penelitian yang digunakan adalah

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas system E-Musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif..

Penelitian ketiga berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018”, ditulis oleh Tengku Herawati, mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area. Dengan menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat 3 faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kec Kota Kualasimpang Kab Aceh Tamiang yaitu transparansi.

Tabel 2.6 Kesimpulan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Analisis		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung	Membahas efektivitas pelaksanaan musrenbang kecamatan	Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaa musrenbang	Melihat faktor penyebab tidak efektivitas pelaksanaan musrenbang
2	Efektivitas Sitem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	Membahas efektivitas musrenbang	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan musrenbang secara elektronik	Melihat efektivitas e-musrenbang

3	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018	Membahas Membahas efektivitas musrenbang	Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan musrenbang	Melihat faktor penyebab tidak efektivitas pelaksanaan musrenbang
---	---	---	--	--

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, perbedaan secara signifikan dari penelitian saya adalah lokasi tempat penelitian yang berbeda, informan penelitian, rumusan masalah yang berbeda dan teori yang digunakan berbeda.

2.7 Kerangka Berpikir

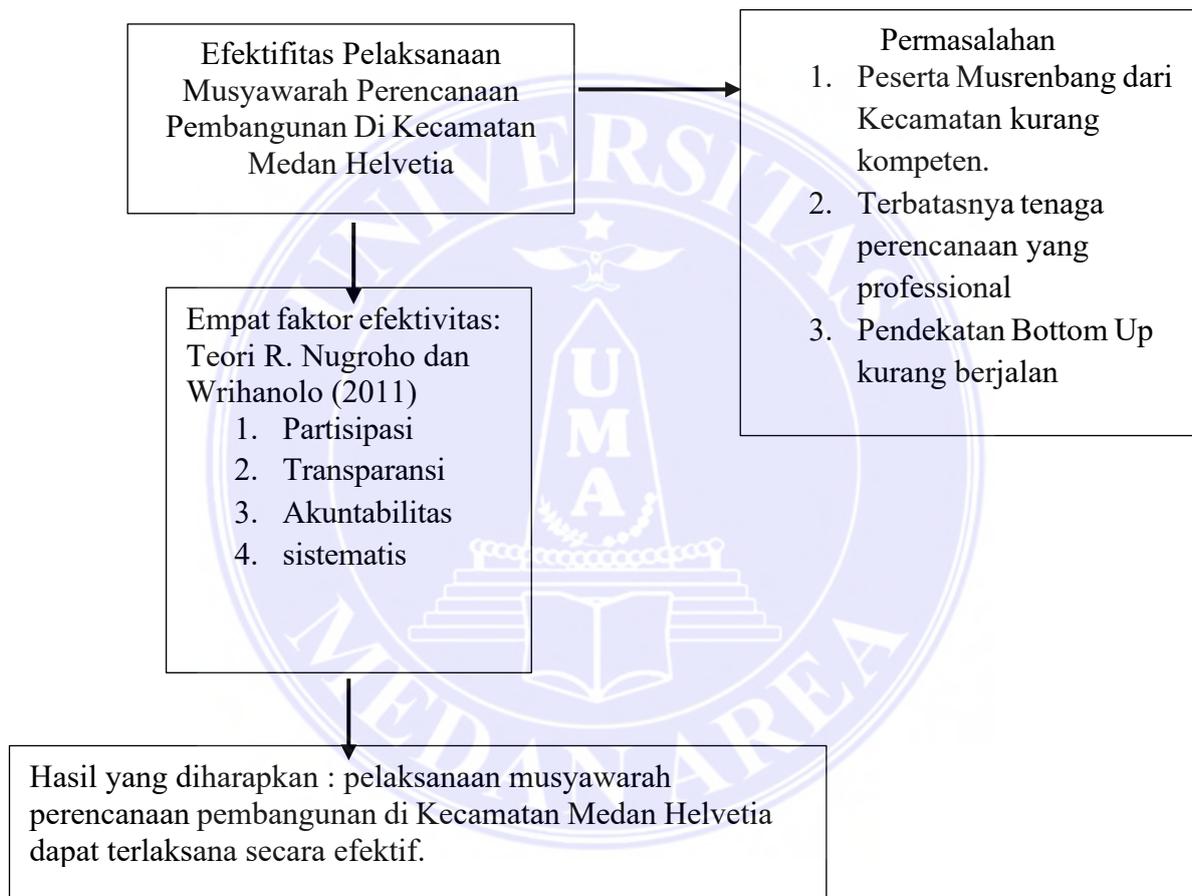
Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2008:65) mengemukakan bahwa: “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.”

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Teori R. Nugroho dan Wrihanolo yang memberikan gambaran bahwa efektivitas suatu pelaksanaan kebijakan di ukur dari partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sistematis yang baik.

Tabel 2.7 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Iskandar:2009).

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen.

Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.(Andi Prastowo:2014)

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J.

Moleong:2015).

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan.

(Sugiyono 2017;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia, dan

- b. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia.

Untuk menjawab fokus penelitian diatas, peneliti memilih informan yang didasarkan atas subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data sehingga fokus penelitian bisa terjawab. Menurut Hendarso (Suyanto, 2005:171-172) informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (*Key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Informan Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kota Medan 	1 Orang
2	Informan Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Medan Helvetia • Sekretaris Camat • Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 	3 Orang

3	Informan Tambahan	• Warga Kelurahan Medan Helvetia	2 Orang
---	-------------------	----------------------------------	---------

3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Medan, sedangkan fokus penelitian ini pada kantor Kecamatan Medan Helvetia yang beralamat Jl. Bringin X No. 2, Helvetia, Medan. Dengan tenggang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan jenis data yang digunakan maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik interaktif melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002: 113). Sedangkan Mulyana (2002: 180) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. (Moleong, 2001).

Denzin, Nasution (2002: 119) juga mengatakan bahwa wawancara terbuka memungkinkan informan spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti. Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya bagaimana Bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia dengan Memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan;
- b. Memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi/pendapat

- c. Memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti dapat langsung memperbaiki/meluruskan pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2003: 30). Data yang didapat melalui berupa kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Helvetia tersebut dilakukan untuk memberi gambaran secara keseluruhan, dan mengenai perilaku atau ekspresi yang terjadi pada saatsuatu pertanyaan tertentu ditanyakan, dan bahkan untuk menyatakan gaya narasumber dalam menanggapi pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dari data yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi yang di peroleh dari data berupa laporan kegiatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2018: 113) terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

1. Pengumpulan Data

Kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menemukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan adanya pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk penyederhanaan, pengelolaan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diseleksi dan diolah sehingga data akan bermakna. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang diperoleh dari berbagai sumber yang hanya sesuai dengan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia

a. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dioptimalkan untuk menemukan

pola-pola yang sederhana. Untuk memudahkan menemukan pola-pola tersebut maka peneliti menggunakan matriks yang dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dari hasil wawancara dengan informan. Dengan cara demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis sebagaimana ditunjukkan dalam penyajian sebagai hal yang mungkin berguna.

Dalam penelitian ini, sajian data ditulis dengan mengutip kalimat-kalimat yang disampaikan oleh informan, kemudian penulis menggabungkan informasi dan melakukan klasifikasi sesuai dengan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia yang selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperjelas informasi yang diperoleh.

b. Penarikan kesimpulan

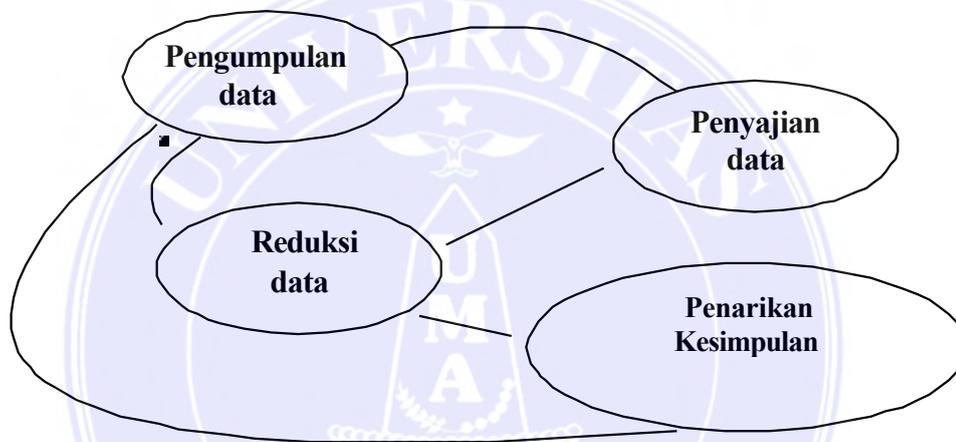
Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Dari sajian data yang diperoleh dan disusun dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang sekaligus dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan informasi dari berbagai

pembahasan untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia

Untuk lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 3.5 Komponen-komponen Analisa Data



3.6 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional

3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, sehingga akan dalam mengoperasikannya dilapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak. Untuk itu, dalam menafsirkan dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Maka definisi konseptual

yang berhubungan dengan apa yang diteliti serta kaitannya dengan teori yang digunakan adalah analisis pelaksanaan musrenbang dan faktor penghambatnya yang dikaitkan dengan teori Nugroho dan Wrihatnolo yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sistematis.

3.6.2 Definisi Operasional

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati) maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional variabel untuk memberikan arah dan mempertegas tujuan dari penelitian, seseuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nugroho dan Wrihatnolo (2011).

1. Efektivitas adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan diperkirakan akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan tepat misalnya, peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana akan lebih baik.
2. Transparansi artinya keterbukaan atas akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.
3. Akuntabilitas adalah setiap perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta

dalam perencanaan dan kegiatan tersebut yang artinya akuntabilitas.

4. Sistematis adalah serangkaian upaya untuk mencari, memilih, dan mengelolah bukti terbaik yang tersedia untuk disusun secara runtun dan berurut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Medan Helvetia masih belum efektif baik dari unsur partisipasi masyarakat, transparansi dari pemerintahan, akuntabilitas, dan sistematis.
2. Faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Medan Helvetia yaitu faktor transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sistematis. Dari keempat faktor ini, sinkronisasi dengan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif harus mengoptimalkan faktor transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sistematis serta anggaran yang tidak memadai dalam hal merealisasikan semua program.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Medan Helvetia, pemerintah kecamatan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi atau diklat kepada seluruh elemen dan stakeholder yang terlibat dalam musrenbang.
2. Pemerintah kecamatan Medan Helvetia dan seluruh perangkatnya harus menanamkan prinsip tanggungjawab, jujur dan arif dalam hal memilih dan memilah berbagai usulan program dari masyarakat untuk dijadikan skala

prioritas serta pemerintahan daerah menambah anggaran kegiatan musrenbang agar berjalan dengan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahmat. (2003). *Kumpulan Teori Efektivitas*. Jakarta : Erlangga.
- Abe. A. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Adrianto, N. (. 2007) *Good e-Governance :Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance*. Bayumedia Publishing : Malang
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta,
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J, W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Deddy, S. B dan Riyadi, Dkk. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Umum : Jakarta.
- Didjaja, Mustofa.(2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gibson, (1996). *Organisasi (Perilaku, Struktural, proses)*, Erlangga, Jakarta,
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Lewis, W. Arthur. (1994). *Perencanaan Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Listyaningsih. (2014). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bpfg Universitas Gajah Mada.
- Miles, B, Mathew, dan Huberman, A. Michael (2007), *Qualitative Data Analysis*, terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Miles, B, Mathew dan Michael Huberman.(1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong , Lexy J. (2002). *Meteorologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nitisastro, W. (2014). *Pengalaman Pembangunan Indonesia : Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta : Penerbit Kompas.

- Nugroho, R dan Wrihatnolo.(2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Media Coputrindo : Jakarta.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detil Rekod : Jakarta.
- Siagian. S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Suyanto, Slamet. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Wijaya, R. (2003). *Forum pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di era otonomi daerah : Studi kasus di Kelurahan, Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya. (2001). *Perencanaan Daerah : Memperkuat Prakarya Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka Utama : Yogyakarta.

B. Jurnal

- Al-Habil, Wasim. (2011). *Governance and Government in Public Administration*. Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 3.
- Azhar,F. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Jurnal kebijakan dan manajemen public, 3(2)..
- Hayati, R. (2017). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. Jurnal Publish, J(2), 449-462.
- Prianto, Andi Luhur. (2011). *Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo Liberal*. Jurnal Otoritas. Vol.1 No.1 April .

Sobari, Wawan. (2007). *Peningkatan Partisipasi Publik Di Era Otonomi daerah-Masih Sebatas Instrumen*. dalam Berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD). Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan, S, AP selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kota Medan.

Wawancara Dengan Bapak Putera Ramadan, S, STP selaku Camat Medan Helvetia.

Wawancara Dengan Bapak Hotler Simatupang, ST. MT Selaku sekretaris Camat Medan Helvetia.

Wawancara Dengan Bapak Untung Manurung, S.Sos selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kecamatan Medan Helvetia.

Wawancara Dengan Bapak Slamet selaku warga Kecamatan Medan Helvetia

Wawancara Dengan Ibu Suana selaku warga Kecamatan Medan Helvetia

LAMPIRAN

1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Jalan Beringin X Nomor 2, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20124
Pos-el kecamatanmedan.helvetia02@gmail.com, Laman <https://medanhelvetia.pemkomedan.go.id>

Medan, 16, Januari 2024.

N o m o r : 000.7.14/ A0
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Undangan

Yth : (Daftar Terlampir)
Di -
Tempat.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor : 000.7.14/11943 tanggal 27 Desember 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Coaching Clinic Aplikasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan untuk Penyusunan RKPD Tahun 2025, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i, pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024.
P u k u l : 09.00 Wib s/d selesai
T e m p a t : Grha Ambeg Paramarta Kantor Camat Medan Helvetia
Jl. Beringin X No. 2 Medan
A c a r a : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i kami ucapkan terimakasih.

An. CAMAT MEDAN HELVETIA
Sekretaris


HOTLER SIMATUPANG, ST,MT
PENATA TINGKAT I
NIP 197710252010011016

T e m b u s a n :
1. Walikota Medan (sebagai laporan);
2. Ka. Bappeda Kota Medan.
3. Pertinggal.

2. Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Medan Helvetia Menurut Perangkat Daerah 2025

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH

Kecamatan : Medan Helvetia
 Tahun : 2025

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
1			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kekurahan Dwikora	Rehabilitasi saluran drainase	Warga	Banjir	Jl setia luhur / sepanjang Jl setia luhur	900 meter / Rp. 4.500.000.000	Dimas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
2			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kekurahan Dwikora	Pembangunan saluran drainase	Warga	Banjir	Jl Budi Luhur LK 1 / Jl Budi Luhur LK 1 Depan Gg Aneka dari depan mesjid Amur/GBK sid simpang kapten muslim/budi luhur	850 meter / Rp. 4.250.000.000	Dimas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Dwikora	Rehabilitasi saluran drainase	Warga	Banjir	Jl Kapten Muslim Lk IV / Jl Kapten Muslim Lk IV, di depan Mega Park s/d rel kurang lebih 300m, Jl Kapten Muslim simpang setia luhur s/d rel kurang lebih 300m	600 meter / Rp. 3.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kelurahan Dwikora	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Warga lingkungan Dwikora	Banyak nya anak remaja yang salah dalam pergaulan sehingga perlu diadakannya sosialisasi	Jl Setia Luhur / Jl Setia Luhur Gg Kesehatan no 97 A	30 orang / Rp. 9.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota Rekonstruksi jalan	Kelurahan Sei Sikambing - C II	Pembetonan jalan		Sering terjadinya banjir di Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid Lr. Buntu diakibatkan oleh jalan yang rusak	Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid Lr. Buntu / Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid Lr. Buntu	0,15 Km / Rp. 150.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Cinta Damai	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat Kelurahan Cinta Damai	Kondisi drainase sudah rusak yang mengakibatkan terjadinya perumpukan sedimen sehingga aliran air tidak bisa mengalir dengan lancar. (Drainase di sebelah kiri dan kanan jalan)	Jl. Pramuka Lk. 3 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia / Dari persimpangan jalan aman-pramuka menuju ke persimpangan jalan sempurna-pramuka	40 meter / Rp. 200.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Document Accepted

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
7			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Cinta Damai	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat Kelurahan Cinta Damai	Perlu dilakukan perbaikan drainase dikarenakan kondisi drainase sudah hancur sehingga menyebabkan penumpukan sedimen yang mengakibatkan fungsi drainase tidak maksimal.	Jalan Bahagia Lk. 6 Kelurahan Cinta Damai / Drainase sepanjang Jalan Bahagia Lk. 6 Kelurahan Cinta Damai	128 meter / Rp. 640.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
8			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Cinta Damai	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat Kelurahan Cinta Damai	Dinding drainase sudah rusak/pecah/retak dan hal ini mengakibatkan drainase tidak berfungsi dengan maksimal.	Jl. Prona Lk. 7 Kelurahan Cinta Damai / Dari persimpangan jalan Dodik menuju ke Jalan Prona	128 meter / Rp. 640.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
9			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Helvetia	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat Jl. Sakura Raya Lk XI, Pihak Puskesmas dan SMP N 18	Drainase yang rusak	Jl. Sakura Raya Lk XI Kel. Helvetia / Akses masuk Puskesmas Helvetia dan SMP N 18	260 meter / Rp. 1.300.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan	Kelurahan Helvetia Timur	Pembangunan Jalan		jalan rusak dan banyak yang berlubang	jalan setia budi / mulai dari jalan setia budi sungai menuju ke simpang 5	1.25 Km / Rp. 1.250.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
11			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Tanjung Gusta	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat setempat	Drainase sudah rusak sehingga air dari Jl. Kalpataru tidak bisa mengalir	Jl. Klambir V Lk 1 / Jl. Klambir V Lk 1 (dari simpang gg Jl. Kalpataru menuju ke parit Gang Aceh/Ameng)	250 meter / Rp. 2.500.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
12			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kelurahan Helvetia Timur	Pengadaan peralatan olahraga	warga lingkungan	kurangnya sarana olahraga bagi warga kelurahan helvetia timur	Jl Setia Budi / Jl Setia budi No 1 Pondok Surya	2 set / Rp. 12.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
13			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kelurahan Helvetia Timur	Uang pengganti transpor kader posbindu PTM	warga lingkungan	untuk menambah semangat kerja para kader posbindu	Jl Persatuan LK VIII / Jl Persatuan No. 49	6 orang / Rp. 360.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
14			<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</p>	Kelurahan Dwikora	Pengadaan peralatan olahraga	Warga lingkungan Dwikora	Sarana Olahraga	Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A / Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A, Kantor Lurah Dwikora	1 set / Rp. 6.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
15			<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</p>	Kelurahan Helvetia	Rehabilitasi Lapangan Olahraga	Masyarakat Lingkungan 6	Lapangan lingkungan yang perlu direhabilitasi	Lingkungan 6 Kel. Helvetia / Lapangan Mini di lingkungan 6	1 Lokasi / Rp. 50.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
16			<p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</p>	Kelurahan Sei Sikambang - C II	Pelatihan Digital Marketing	masyarakat Lk. VII yang memiliki UMKM	Meningkatkan promosi dan daya jual UMKM masyarakat lingkungan VII untuk menghadapi pasar global	Jl. Gatot Subroto Gg. Sukasetia Lk. VII / Jl. Gatot Subroto Gg. Sukasetia Lk. VII	20 orang / Rp. 10.000.000	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
17			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Sei Sikambing - C II	Pembangunan saluran drainase	jalan lingkungan	Belum adanya parit di Jl. Jawa Gg. Buntu 2 LK. XI	Jl. Jawa Gg. Buntu 2 LK. XI / Jl. Jawa Gg. Buntu 2 LK. XI	80 meter / Rp. 400.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
18			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan	Kelurahan Helvetia	Pengaspalan jalan		Jalan rusak dan berlubang	Jalan Palem 3 Lk 9 / Sepanjang jalan palem 3	0.18 Km / Rp. 180.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
19			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Helvetia	Rehabilitasi saluran drainase	Masyarakat Lingkungan 9	Crossing Drainase Jalan Simp Palem V ke Parit Besar Helvetia Raya yang rusak dan tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras	Jalan Simp Palem V dan Jalan Helvetia Raya / Jalan Simp Palem V ke Parit Besar Helvetia Raya	6 meter / Rp. 30.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
20			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kelurahan Sei Sikambing - C II	Pelatihan Content Creator	pemuda Lk. XIII	Untuk mengembangkan wawasan dan kreativitas para pemuda di Lingkungan XIII agar bisa dijadikan salah satu peluang kerja atau bisnis	Jl. Ampera I dan Jl. Ampera II Lk. XIII / Jl. Ampera I dan Jl. Ampera II Lk. XIII	10 orang / Rp. 5.000.000	Dinas Pariwisata

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
21			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kelurahan Sei Sikambang - C II	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	warga Kelurahan Sei Sikambang C II	Untuk mencegah semakin mewabahnya penyakit DBD, maka diperlukan penyemprotan/fogging secara berkala	Kelurahan Sei Sikambang C II / Kelurahan Sei Sikambang C II	14 Kegiatan / Rp. 7.000.000	Dinas Kesehatan
22			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kelurahan Tanjung Gusta	Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB		Perlunya pemberian makanan tambahan kepada pasien TB Paru	Kelurahan Tanjung Gusta / Aula Kelurahan Tanjung Gusta	14 orang / Rp. 7.000.000	Dinas Kesehatan
23			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kelurahan Helvetia	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Remaja/Pemuda Kelurahan Helvetia	Kurangnya pengetahuan bahaya narkoba bagi remaja/pemuda	Kelurahan Helvetia / Kelurahan Helvetia	30 orang / Rp. 9.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
24			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelurahan Tanjung Gusta	Pelatihan pengolahan bahan makanan	Ibu-ibu dan perempuan muda	Kurangnya keterampilan warga dalam pengolahan bahan makanan	Kelurahan Tanjung Gusta / Aula Kelurahan Tanjung Gusta	20 orang / Rp. 30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
25			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tanjung Gusta	Bantuan peralatan jahit menjahit kepada kelompok UMKM		Kurangnya dana untuk membeli peralatan menjahit demi memajukan UMKM dan pendapatan warga	Kelurahan Tanjung Gusta / Kelurahan Tanjung Gusta	10 unit / Rp. 100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
26			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tanjung Gusta	Bantuan peralatan rumah tangga/masak memasak/kuliner		Kurangnya peralatan masak-memasak demi mendukung kemajuan UMKM warga	Kelurahan Tanjung Gusta / Kelurahan Tanjung Gusta	10 unit / Rp. 100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kelurahan Tanjung Gusta	Pengadaan peralatan olahraga	Pegawai Kelurahan, Kepala Lingkungan maupun warga yang ingin berolahraga	Belum adanya perlengkapan olahraga berupa tenis meja di Kelurahan Tanjung Gusta	Kelurahan Tanjung Gusta / Kelurahan Tanjung Gusta	2 set / Rp. 12.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
28			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan	Kelurahan Helvetia	Pengaspalan jalan		Jalan rusak dan berlubang	Jalan Helvetia Raya / Sepanjang jalan helvetia raya dari simpang jalan sakura raya sampai dengan Jalan matahari raya	1 Km / Rp. 1.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
29			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Helvetia Tengah	Pembangunan saluran drainase	Masyarakat Lingkungan 1 dan 3	Pendangkalan drainase yang menyebabkan tidak berfungsinya drainase saat curah hujan tinggi dan sudah tidak ada pembangunan selama 35 tahun	Jalan Gaperta Lingkungan 1 Helvetia Tengah / Jalan Gaperta Lingkungan 1 Helvetia Tengah	1200 meter / Rp. 6.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
30			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelurahan Helvetia Tengah	Pelatihan pengolahan bahan makanan	masyarakat kelurahan helvetia tengah	pembinaan UMKM di bidang pengolahan makanan	kelurahan helvetia tengah / kelurahan helvetia tengah	30 orang / Rp. 45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
31			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Helvetia Timur	Pengadaan Peralatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)	warga masyarakat	sering terjadi banjir	Jalan Speksi Lingkungan 1 / Sepanjang Jalan Speksi bantaran sungai	2 paket / Rp. 400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
32			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Helvetia Timur	Pelebaran saluran drainase perkotaan	warga lingkungan dan masyarakat	PARIT KECIL DAN DANGKAL	Jalan Sawah Halus lingkungan 3 / Jalan Sawah Halus lingkungan 3	90 meter / Rp. 900.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
33			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Helvetia Timur	Pendalaman saluran drainase lingkungan (Saluran Tipe A1)	warga lingkungan dan masyarakat	Parit dangkal dan kecil sehingga tidak mampu menampung debit air kalau hujan	Jalan Jongkong lingkungan 3 / Jalan Jongkong dari Mesjid Al-ikhlas sampai SD Ikal parit sebelah kiri	300 meter / Rp. 1.500.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
34			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rekonstruksi Jalan	Kelurahan Helvetia Tengah	Pembetonan jalan		perlu nya pembetonan di sepanjang jalan helvetia raya	Jalan Helvetia Raya / Jalan Helvetia Raya	2 Km / Rp. 2.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
35			PROGRAM PEMENUJIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kelurahan Helvetia Tengah	Pemberian makanan tambahan		pemberian makanan tambahan bergizi	kantor lurah helvetia tengah / kantor lurah helvetia tengah	30 orang / Rp. 7.500.000	Dinas Kesehatan

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
36			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kelurahan Helvetia Tengah	Pendalaman saluran drainase lingkungan (Saluran Tipe A1)	masyarakat lingkungan 12	pendangkalan drainase yang menyebabkan tidak berfungsinya drainase saat curah hujan tinggi	Jalan Kemuning Raya lingkungan 12 / Jalan Kemuning Raya lingkungan 12	200 meter / Rp. 1.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
37			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjaci Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kelurahan Helvetia Tengah	Rehabilitasi Lapangan Olahraga	masyarakat lingkungan 9	Perbaikan lapangan tempat sarana dan prasarana bermain dan olahraga	Jalan Aster 4 / Jalan Aster 4	1104 Lokasi / Rp. 55.200.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
38			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kelurahan Dwikora	Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	Warga lingkungan Dwikora	Terdapat Warga Disabilitas di Kelurahan Dwikora	Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A / Kantor Lurah Dwikora, Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A	30 orang / Rp. 4.500.000	Dinas Sosial

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

Ade Irma Hasanah - Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
39	-	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelurahan Dwikora	Pelatihan pengolahan bahan makanan	Warga lingkungan Dwikora	Belum adanya pelatihan pengolahan makanan bergizi terhadap UMKM di lingkungan Dwikora	Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A / Kantor Lurah Dwikora, Jl Setia Luhur Gg Kesehatan No 97 A	30 orang / Rp. 45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
40	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Sei Sikambang - C II	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM Kota Medan	kelompok UMKM bidang pangan di wilayah lingkungan VIII	Untuk meningkatkan keterampilan home industry kecil di bidang pangan di wilayah lingkungan VIII, maka perlu dilakukan pelatihan kewirausahaan untuk mereka	Lingkungan VIII / Lingkungan VIII	11 orang / Rp. 55.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
41	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kelurahan Cinta Damai	Pengadaan peralatan olahraga	Masyarakat Kelurahan Cinta Damai	Guna menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan cara menyediakan sarana dan prasarana olahraga	Kelurahan Cinta Damai / Jl. Mesjid no.48 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia	1 set / Rp. 6.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

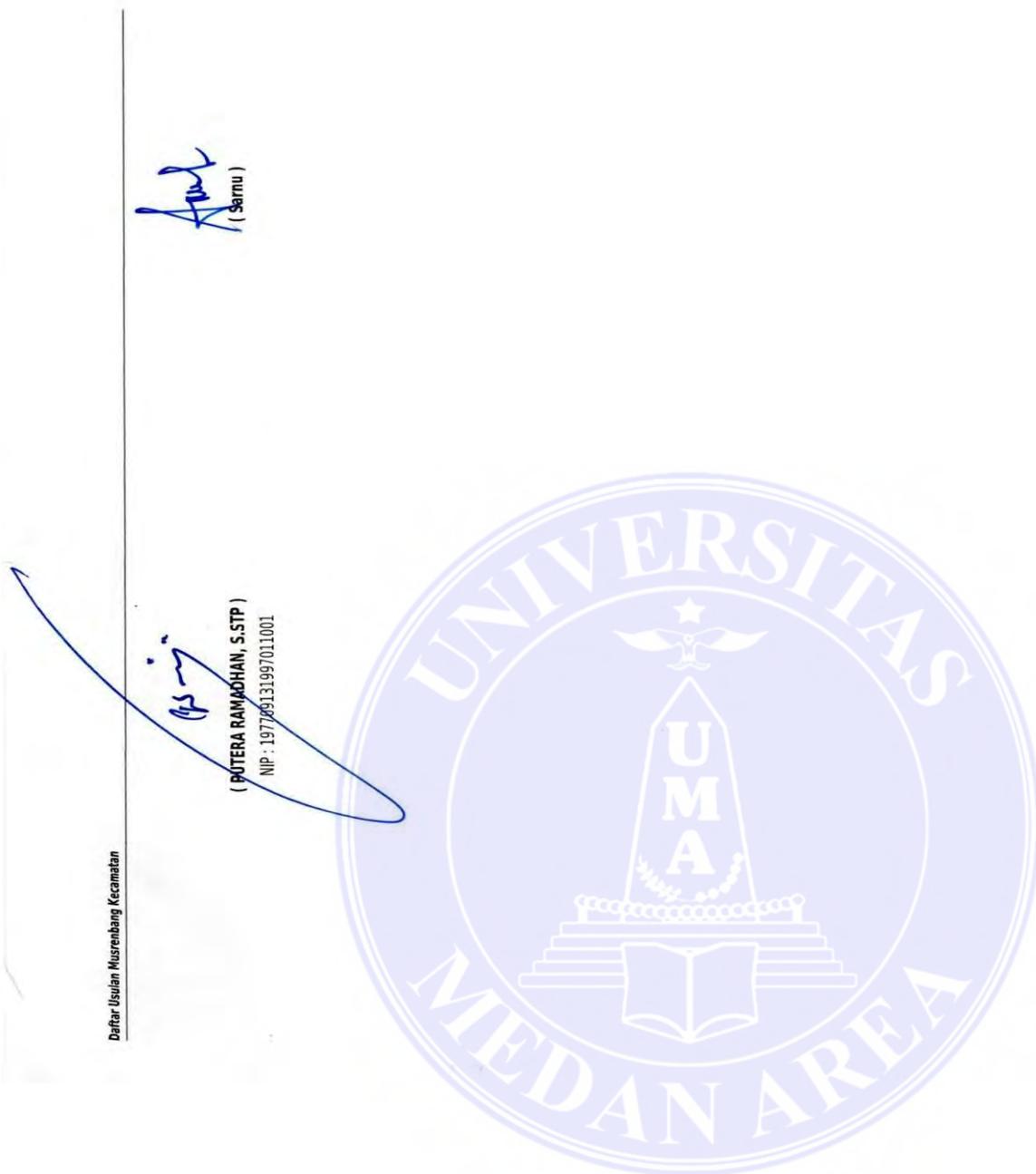
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Kelompok Sasaran	Permasalahan	Alamat / Detail Lokasi	Volume / Anggaran	OPD Tujuan
42	-	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kelurahan Sei Sikambang - C II	Sosialisasi Bahaya Narkoba	pemuda setempat Kelurahan Sei Sikambang C II	Dikarenakan status Kelurahan Sei Sikambang C II sebagai Kelurahan Waspada Narkoba, maka diperlukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba	Kelurahan Sei Sikambang C II / Kelurahan Sei Sikambang C II	50 orang / Rp. 15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
43	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kecamatan Medan Helvetia	Rehabilitasi saluran drainase	jalan lingkungan	Drainase sudah tidak mampu menampung air hujan, perlu pendalaman ataupun pemasangan U-Ditch sepanjang Jalan Gaperta Ujung Lk. IV dan V dari parit Cempaka s.d. Sei Bederah (Kampus UNUSU)	Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia / Jalan Gaperta Ujung Lk IV dan V dari parit Cempaka s.d. Sei Bederah (samping UNUSU), Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia	1600 meter / Rp. 8.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
44	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kecamatan Medan Helvetia	Pembangunan saluran drainase	jalan lingkungan	Drainase masih tanah kirikan	Jl. Bakti Utara Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia / Jl. Bakti Utara Lk VI Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia	1400 meter / Rp. 7.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Mengetahui
Camat Medan Helvetia

Perwakilan Masyarakat



3. Dokumentasi pelaksanaan penelitian, riset, wawancara, dan pengambilan data di kecamatan Medan Helvetia



Wawancara dengan Kepala Bappeda Sumatera Utara



Wawancara dengan Camat Medan Helvetia



Wawancara dengan Sekretaris Camat Medan Helvetia